DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta*

Cholid dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Bumi Aksara

H. Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, ed. revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Irawan Soeharto, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian* Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung; Remaja Rosda Karya

Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta*:* Bumi Aksara

Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 2011, *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah*, Jakarta

Lubis, Solly, 2004, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju

Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan (edisi revisi)*, Yogyakarta: Andi Offset

Marihot Pahala Siahaan, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mohammad Mahsun, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE

Muhammad Rusjdi, 2005, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, Jakarta: PT Indeks

Munawir, S, 1992, *Perpajakan*. Ed. 4. Cet. 1, Yogyakarta: Liberty

Munawir, S, 1992, *Perpajakan*. Ed. 4. Cet. 1, Yogyakarta: Liberty

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

R. Santoso Brotodiharjo, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2008, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rimsky K. Judisseno, 2002, *Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjuan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Rochmat Soemitro, 1974, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Eresco

Safri Nurmana, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Obor Indonesia

Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara

Siahaan, Marihot Pahala, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta : Rajawali Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Gravindo Persada

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (akarta: Universitas Indonesia Press

Suandy, Erly, 2005, *Perencanaan Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat

Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Bandung : Pustaka Setia

Sudirman, A, 2007, *Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): Kasus hakim Bismar Siregar,* Bandung: Citra Aditya Bakti

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2005, *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Penghitungan,* Ed. 1, Yogyakarta: ANDI

Waluyo dan Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia Edisi ke 4*, Jakarta: Salemba Empat

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses,* Yogyakarta: *Media Pressindo*

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya

C. Website:

Departemen Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2008

Dwi Sulistyawati, Jurnal Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat, ISSN 1428: Notariat 2018

http://widhihandoko.com/?p=565 *Permasalahan dan Jawaban Sistem Pendaftaran Tanah*

Ratih Harinsari, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid, "*Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri*)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 2 April 2013